

**ANALISIS TERHADAP MANAJEMEN LABA SEBAGAI RESPON
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 1994
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh derajat Sarjana S-2

Program Studi Ilmu Akuntansi
Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial



Ditujukan Oleh :
Linda Santioso
No. Mhs. : 15576 / IV-3 / 1337 / 00

Kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2002

**ANALISIS TERHADAP MANAJEMEN LABA SEBAGAI RESPON
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 1994
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh derajat Sarjana S-2

Program Studi Ilmu Akuntansi
Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial



Diajukan Oleh :
Linda Santioso
No. Mhs. : 15576 / IV-3 / 1337 / 00

Kepada
**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**
2002

Tesis

ANALISIS TERHADAP MANAJEMEN LABA SEBAGAI RESPON PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 1994 DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

dipersiapkan dan disusun oleh

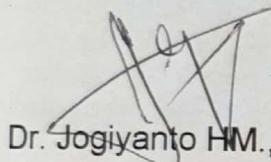
LINDA SANTIOSO
15576/IV-3/1337/00

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

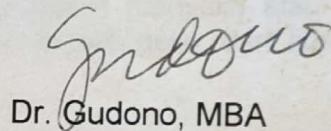
pada tanggal 26 JANUARI 2002

Susunan Dewan Penguji

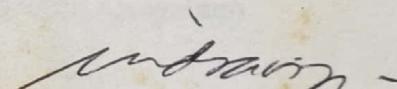
Pembimbing Utama


Dr. Jogiyanto HM., MBA

Anggota Dewan Penguji Lain


Dr. Gudono, MBA

Pembimbing Pendamping I

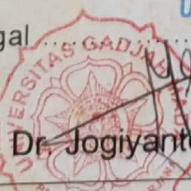

Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA

Pembimbing Pendamping II

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal

08 APR 2002



Dr. Jogiyanto HM., MBA

Pengelola Program Studi : Akuntansi



UNIVERSITAS GADJAH MADA
PROGRAM PASCASARJANA: MAGISTER SAINS DAN DOKTOR
Program Studi Ilmu-ilmu: Ekonomi dan Studi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul :

ANALISIS TERHADAP MANAJEMEN LABA SEBAGAI RESPON PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 1994 DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

dan dimajukan untuk diuji pada **tanggal 26 Januari 2002**, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tesis yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, tanggal 26 Januari 2002

Yang memberi pernyataan

Linda Santioso

Saksi 1, sebagai pembimbing tesis merangkap anggota tim penguji tesis:

~~Dr. Jegiyanto HM., MBA~~

Saksi 2, sebagai anggota tim penguji tesis: Saksi 3, sebagai anggota tim penguji tesis:

-
Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA

-
Dr. Gudono, MBA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih pula untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk mengikuti program Magister Sains di Universitas Gadjah Mada. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai derajat sarjana S2 Program Magister Sains Program Studi Ilmu Akuntansi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Jogiyanto H.M., MBA, Ak., sebagai Ketua Program Studi Magister Sains Program Studi Ilmu Akuntansi dan juga sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga di antara kesibukan-kesibukan beliau untuk membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Dali S. Naga, MMSI selaku Rektor Universitas Tarumanagara dan Bapak Drs. Matias Zakaria, Msi, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program studi Magister Sains ini.
3. Semua Dosen Program Studi Magister Sains yang telah memberikan ilmu pengetahuannya.

4. Para Staff Bursa Efek Jakarta, Staff Program Studi Magister Sains Universitas Gadjah Mada, Staff Pusat Pengembangan dan Pendidikan Universitas Tarumanagara, Staff Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, serta Staff Perpustakaan Magister Sains dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada.
5. Teruntuk Papa dan Mama, suami, kakak serta saudara-saudaraku lainnya yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil, terutama dalam memperhatikan dan menjaga kesehatan penulis, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
6. Seluruh rekan-rekan seangkatan dan rekan-rekan Dosen Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik mengenai materi, cara penyajian maupun hal-hal lainnya.

Oleh karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima kritik serta saran yang membangun dari para pembaca, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 26 Januari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| ABSTRACT | xi |
| INTISARI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5. Sistematika Pembahasan | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1. Manajemen Laba | 8 |
| 2.2. Agency Theory | 12 |
| 2.3. Perubahan atas Undang-Undang Perpajakan | 15 |

| | |
|---|----|
| 2.4. Kebijakan Akuntansi Akrual | 17 |
| 2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu atas Manajemen Laba | 21 |
| 2.6. Pengembangan Hipotesis | 25 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian | 30 |
| 3.2. Pengumpulan Data | 31 |
| 3.3. Perumusan Model | 32 |
| 3.3.1. Total Akrual | 32 |
| 3.3.2. Discretionary Accrual | 33 |
| 3.4. Identifikasi Variabel | 35 |
| 3.4.1. Variabel Dependen | 35 |
| 3.4.2. Variabel Independen | 36 |
| 3.5. Metoda Analisis | 37 |
| 3.5.1. Analisis Deskriptif | 37 |
| 3.5.2. Uji Statistik | 39 |

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA

| | |
|---|----|
| 4.1. Analisis Data | 41 |
| 4.1.1. Periode Sebelum Adanya Perubahan Undang-Undang Perpajakan | 41 |

| | |
|---|----|
| 4.1.1.1. Pengujian Asumsi Klasik | 41 |
| 4.1.1.2. Estimasi NDA dengan Model Jones yang Dimodifikasi | 44 |
| 4.1.2. Periode Setelah Adanya Perubahan Undang-Undang Perpajakan | 45 |
| 4.1.2.1. Pengujian Asumsi Klasik | 45 |
| 4.1.2.2 Estimasi NDA dengan Model Jones yang Dimodifikasi | 47 |
| 4.2. Hasil Penelitian | 47 |
| 4.2.1. Uji beda Discretionary Accrual | 47 |
| 4.2.2. Hasil Analisis Regresi atas Variabel-variabel Independen | 50 |
| | |
| BAB V KESIMPULAN | |
| 5.1. Kesimpulan | 55 |
| 5.2. Diskusi | 56 |
| 5.3. Keterbatasan | 57 |
| 5.4. Riset Mendatang | 57 |
| 5.5. Implikasi Penelitian | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| LAMPIRAN | 63 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---|
| <i>Periode Sebelum Adanya Perubahan Undang-Undang Perpajakan</i> | |
| Tabel 1. | Hasil Uji Multikolinieritas 42 |
| Tabel 2. | Hasil Uji Autokorelasi 42 |
| Tabel 3. | Hasil Uji Heteroskedastisitas 43 |
| Tabel 4. | Hasil Estimasi Non-Discretionary Accrual dengan Model Jones yang Dimodifikasi 44 |
| <i>Periode Setelah Adanya Perubahan Undang-Undang Perpajakan</i> | |
| Tabel 5. | Hasil Uji Multikolinieritas 45 |
| Tabel 6. | Hasil Uji Autokorelasi 46 |
| Tabel 7. | Hasil Uji Heteroskedastisitas 46 |
| Tabel 8. | Hasil Estimasi Non-Discretionary Accrual dengan Model Jones yang Dimodifikasi 47 |
| Tabel 9. | Hasil Uji beda rata-rata Discretionary Accrual 49 |
| Tabel 10. | Hasil Pengujian Asumsi Klasik atas Variabel-variabel Independen 50 |
| Tabel 11. | Hasil Analisis Regresi dari Variabel-variabel Independen 51 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nama Perusahaan 63

ABSTRACT

As we know so far accounting is a way to describe firm's financial information is not perfect and can not be release from estimation, alternatives methods and subjectivity. This flexibility will induce management to do earnings management in preparing financial report. This is happening because management as a part that provides financial information and directly involved in firm's activities, intends to report all things that can maximize their utilities. As we know, in 1994 government did tax reformation, which one of them resulted in changing of corporate income tax rate.

The objective of this study was to find empirical evidence that with the changes in corporate income tax rate, whether earnings management are still done in Indonesia and whether firm size, debt level and manager ownership will cause earnings management.

Samples used in this study are manufacture firms with six years observation periods from 1992 through 1997. Discretionary accrual after the changes period was higher and statistically significant. This study used multiple regression analysis and paired samples t-test in analyzing data.

Result of this study shows statistically significant that discretionary accrual after the changes period were higher than before. This indicates that with the changing of corporate income tax rate earnings management are still done. This study also find that firm size and debt level will effect earnings management, but manager ownership have no effect on earnings management.

INTISARI

Akuntansi yang kita kenal dan kita ketahui selama ini sebagai wadah atas informasi keuangan perusahaan memang tidak sempurna dan tidak dapat dilepaskan dari estimasi, kebebasan dalam memilih berbagai metode alternatif yang ada dan terkadang melibatkan subyektivitas dari manajemen itu sendiri. Dengan adanya fleksibilitas ini maka akan memicu timbulnya perilaku manajemen laba dalam penyusunan Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan karena manajemen sebagai pihak yang menyediakan informasi keuangan dan secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, cenderung untuk melaporkan segala sesuatu yang dapat memaksimumkan utilitas dirinya. Seperti yang telah diketahui pada tahun 1994 pemerintah mengadakan reformasi perpajakan yang salah satunya menghasilkan perubahan tarif pajak penghasilan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan yang baru, praktik manajemen laba masih tetap dilakukan di Indonesia dan apakah faktor ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan serta tingkat kepemilikan manajemen dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan sebanyak 6 tahun yaitu dari tahun 1992 sampai dengan 1997. Nilai *discretionary accrual* pada periode setelah adanya perubahan lebih tinggi dan berbeda secara signifikan dari nol. Dalam menganalisa data digunakan analisa regresi dan uji *paired samples t-test*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa *discretionary accrual* pada periode setelah adanya perubahan lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Hal ini berarti bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan, praktik manajemen laba masih tetap dilakukan. Selanjutnya ditemukan pula bahwa tindakan manajemen laba dapat dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan dan tingkat hutang perusahaan sedangkan faktor tingkat kepemilikan manajemen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Informasi mengenai kinerja perusahaan, terutama profitabilitas sangat diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi perusahaan. Di samping itu informasi kinerja juga bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada dan juga sebagai bahan pertimbangan mengenai efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Hal tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan perusahaan untuk lebih memperhatikan laba dalam laporan keuangannya.

Bagi para pengguna laporan keuangan, informasi akuntansi merupakan data vital yang dipergunakan untuk menilai suatu perusahaan, mengambil keputusan investasi dan lain-lain. Informasi akuntansi yang tidak valid dapat menyebabkan investor salah dalam mengambil keputusan dan salah menanamkan dananya.

Seperti yang telah diketahui, pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi 2 pihak yaitu pihak ekstern perusahaan (pemegang saham, kreditor, pemerintah) dan pihak intern perusahaan (manajemen). Dari pihak-pihak tersebut, manajemen

merupakan pihak yang memiliki akses langsung dalam penyusunan laporan keuangan karena ia merupakan pengelola aktiva perusahaan secara langsung. Pemegang saham sebagai pihak yang menanamkan modalnya pada perusahaan, kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman pada perusahaan dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam kaitannya untuk memperoleh dana pembangunan dalam bentuk pajak, semuanya merupakan pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan informasi laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen.

Seringkali antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak ekstern perusahaan terdapat perbedaan kepentingan, yang berarti adanya ketidakselarasan tujuan antara satu dengan lainnya. Perbedaan kepentingan ini dapat mendorong timbulnya konflik, seperti manajemen berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Konflik antara manajemen dengan pihak kreditor juga terjadi, yaitu manajemen ingin memperoleh kredit sebesar mungkin sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan. Hal ini dapat menjadi masalah bagi perusahaan dan akan mendorong terjadinya *dysfunctional behavior* yaitu apabila manajemen membutuhkan kredit dalam jumlah yang lebih besar dari yang dapat diterima, ia akan termotivasi untuk melakukan manipulasi atas laporan keuangan supaya kemampuan perusahaan terlihat lebih baik dimata kreditor. Konflik antara manajemen dengan pemerintah biasanya timbul dalam hal perpajakan. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, pada dasarnya

pemerintah berkeinginan untuk memungut pajak setinggi mungkin (merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah), sedangkan manajemen sebagai pihak yang melakukan pembayaran sudah tentu ingin membayar pajak sekecil mungkin. Apabila beban pajak tersebut dirasakan terlalu berat bagi perusahaan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan.

Seperti telah diketahui bahwa pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengenai perpajakan yaitu mengubah tarif perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994. Adapun perubahan tarif yang berlaku di Indonesia mulai saat itu adalah:

| Tarif Lama | | | Tarif Baru | | |
|------------|-----|-----------------|------------|-----|-----------------|
| I | 15% | 0 s/d 10 juta | I | 10% | 0 s/d 25 juta |
| II | 25% | 10 s/d 50 juta | II | 15% | 25 s/d 50 juta |
| III | 35% | 50 juta ke atas | III | 30% | 50 juta ke atas |

Dengan melihat perubahan tarif pada tabel di atas maka secara jelas dapat diketahui bahwa tarif tersebut mengalami penurunan, tetapi dengan adanya penurunan tersebut apakah akan membawa dampak bagi perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba ? Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena pada dasarnya semua perusahaan mengharapkan keuntungan yang optimal dan laporan keuangannya terlihat bagus.

Dalam situasi seperti ini biasanya akan menimbulkan 2 laporan yang berbeda sesuai dengan kepentingan para pemakai laporan yaitu laporan menurut perpajakan dan laporan menurut perusahaan itu sendiri, yang tentunya akan difokuskan pada laba menurut pajak dan laba menurut perusahaan. Pada umumnya perusahaan akan cenderung untuk meminimumkan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar yaitu dengan cara mempercepat pengakuan beban atau menangguhkan pengakuan pendapatan. Secara akuntansi hal ini dapat diterima karena menganut prinsip *accrual basis* yaitu pengakuan beban dan pendapatan pada periode di mana seharusnya terjadi atau yang dikenal dengan istilah *matching concept* (menandingkan beban dengan pendapatan).

Jadi dapat dikatakan bahwa para akuntan umumnya akan mencoba untuk menghindari *overstating revenues* atau *understating expense* untuk tujuan pajak. Oleh karena itu untuk melindungi pendapatan pemerintah melalui pajak (mencegah pemerintah mengalami kerugian yang besar) maka peraturan-peraturan yang telah ada dirancang sedemikian rupa untuk mencegah pembayar pajak (perusahaan) melakukan *understating revenues* atau *overstating expenses*.

Di luar negeri, manajemen laba ini sudah lama menjadi perhatian para praktisi dan akademisi, dan sudah banyak pula penelitian mengenai manajemen laba ini. Di Indonesia sendiri, sejauh pengamatan penulis belum banyak penelitian mengenai manajemen laba, diantaranya dilakukan oleh Setiawati (1999), Kiswara (1999) dan

Sutanto (2000). Setiawati (1999) dalam penelitiannya mengevaluasi perilaku manajemen laba dalam industri perbankan di Indonesia dan dia menemukan bahwa bank yang mengalami penurunan skor kesehatan memilih kebijakan akrual yang dapat meningkatkan laba. Kiswara (1999) meneliti praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia dan dia menemukan bahwa keberadaan unsur manajemen laba dalam bentuk kebijakan akuntansi akrual tidak didukung oleh ukuran total aktiva dan jenis penanaman modal perusahaan publik tetapi didukung oleh klasifikasi industri. Sutanto (2000) meneliti praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang akan IPO dan dia menemukan bahwa manajer perusahaan yang melakukan IPO menggunakan *discretionary accruals* untuk meningkatkan laba akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan prospektus. Penelitian mengenai perilaku perataan laba yang merupakan salah satu bentuk dari manajemen laba telah banyak dilakukan diantaranya oleh Ilmainir (1993) dan Jin (1997).

1.2. Perumusan Masalah

Pada umumnya perusahaan cenderung untuk melaporkan jumlah laba yang kecil dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Salah satu cara yang biasanya digunakan adalah dengan memanipulasi atas laba perusahaan. Seperti yang telah diketahui bahwa pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yaitu mengubah tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan tahun 1994, di mana perubahan tersebut menghasilkan tarif yang menurun. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba sehubungan dengan perubahan tarif perpajakan yang baru ?
2. Apakah tindakan manajemen laba akan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan dan tingkat kepemilikan manajemen ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris bahwa dengan adanya perubahan tarif perpajakan yang baru, apakah praktik manajemen laba masih tetap dilakukan di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga ingin menemukan bukti empiris apakah faktor ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan serta tingkat kepemilikan manajemen dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dan calon investor untuk lebih berhati-hati dalam menginterpretasikan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan mengingat adanya kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Bagi pemerintah

diharapkan agar lebih berhati-hati terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan, mengingat hal ini berhubungan dengan pendapatan bagi negara yaitu dalam bentuk sejumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan perubahan atas Undang-Undang Perpajakan yang menghasilkan penurunan terhadap tarif pajak penghasilan, bukan berarti perusahaan tidak akan melakukan manajemen laba.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dilaporkan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II akan membahas mengenai manajemen laba, *agency theory*, kebijakan akuntansi akrual, tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai kerangka teoritis dan pengembangan model serta perumusan hipotesis. Dalam Bab III akan diuraikan mengenai populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data, perumusan model dan metodologi yang digunakan dalam analisis data dan pengujian hipotesis. Kemudian Bab IV memuat data untuk menguji hipotesis penelitian dan analisis atas data tersebut. Terakhir Bab V akan menyajikan kesimpulan, diskusi, keterbatasan, riset mendatang dan implikasi dari hasil penelitian ini. Demikianlah kerangka pemikiran yang merupakan sistematika pembahasan dalam tesis ini.

BAB II

Landasan Teori

2.1. Manajemen Laba

Laporan keuangan merupakan jembatan antara pihak internal (manajemen) dengan pihak eksternal (kreditor, investor dan pemerintah). Menurut SAK (1995) menyatakan bahwa tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah informasi tentang *earnings* dan komponen-komponennya, sebab pihak eksternal umumnya hanya memfokuskan perhatiannya pada laba (*earnings*) yang terdapat dalam laporan laba rugi.

Pada dasarnya semua bagian dari laporan keuangan itu diperlukan, namun baik investor, kreditor maupun pemerintah cenderung lebih memperhatikan laba yang dihasilkan. Situasi seperti ini diketahui oleh pihak manajemen sehingga manajemen cenderung untuk memanipulasi labanya yang dikenal dengan istilah *earnings management*. Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan.

Manajemen laba merupakan suatu usaha untuk mengarahkan pelaporan keuangan terutama laba pada tingkat tertentu menurut batasan yang diijinkan oleh Standar Akuntansi Keuangan dengan memanfaatkan metode-metode alternatif yang ada.

Fischer dan Rosenzweig (1995) mendefinisikan *earnings management* secara formal sebagai :

“..... actions of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in the long term economics profitability of the unit”.

Dari definisi yang diberikan oleh Fischer dan Rosenzweig (1995) ini, tercermin pengertian yang lebih luas yaitu pada kata *actions* yang tidak membatasi pada keputusan pemilihan metode akuntansi tetapi lebih luas mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola *earnings* termasuk pula keputusan operasi perusahaan.

Secara umum *earnings management* dilakukan dengan mengatur komponen *discretionary accruals* untuk menentukan besar kecilnya *earnings*, sehingga pola *earnings management* itu dapat dikenali dalam 4 bentuk yaitu : (1) *taking a bath* ; (2) *income minimization* ; (3) *income maximization* ; (4) *income smoothing*.

Healy (1985) sebagaimana dikutip oleh Sugiri (2000) melakukan penelitian mengenai *earnings management* dengan menggunakan hipotesis *bonus plan* dengan pola *taking a bath*. Healy berasumsi bahwa perusahaan terdiri atas seorang manajer yang menolak risiko (*risk averse*) dan lebih dari satu pemilik. Penelitian Healy menemukan bukti empiris yang mendukung hipotesisnya. Implikasi yang dikemukakan Healy adalah manajer akan berperilaku oportunistik ketika menghadapi *intertemporal choice*. Jika pada suatu tahun tertentu, ia menghadapi kenyataan bahwa ia tidak dapat memperoleh

bonus, maka ia akan berusaha untuk memaksimumkan bonusnya di tahun berikutnya.

Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan menggeser atau mempercepat biaya akrual *discretionary* periode mendatang ke periode kini dan menggeser atau menangguhkan pendapatan akrual *discretionary* periode kini ke periode mendatang.

Cahan (1992) serta Naim dan Hartono (1996) meneliti *earnings management* dengan menggunakan hipotesis *political cost* dengan pola *income minimization*. Cahan memprediksi bahwa *discretionary accruals* dari perusahaan yang diinvestigasi untuk pelanggaran *antitrust* cenderung lebih *income reducing* selama periode investigasi daripada selama periode tidak diinvestigasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa manajer melakukan penyesuaian *earnings* ke bawah atau dengan kata lain laba operasi sengaja diturunkan dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi denda akibat tuduhan pelanggaran undang-undang *antitrust*. Usaha untuk meminimumkan laba ini mungkin dapat ditemui pula untuk tujuan perpajakan, karena jumlah pajak tergantung pada besar kecilnya jumlah laba kena pajak.

Sweeney (1994) melakukan penelitian mengenai *earnings management* dengan menggunakan hipotesis *debt/equity* dengan pola *income maximization*. Sweeney mendapatkan informasi mengenai eksistensi dan sifat pelanggaran dari *debt covenant* dalam laporan keuangan perusahaan dan dia menemukan pula bahwa pelanggaran perjanjian hutang yang paling banyak terjadi adalah untuk memelihara *working capital* dan *stockholders' equity*. Temuannya yang lain adalah bahwa perubahan dalam

kebijakan akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk memanipulasi laba yang dilaporkan melalui pengadopsian standar yang baru yaitu dengan cara menerapkan lebih awal standar-standar yang dapat meningkatkan *earnings* dan memperlambat penerapan standar yang dapat menurunkan *earnings*. Begitu pula dengan De Fond dan Jiambalvo (1994), mereka juga menemukan bahwa manajer dari perusahaan yang nyaris melanggar perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk meminimalkan kerugian akibat pelanggaran perjanjian kredit.

Usaha untuk memaksimumkan laba mungkin dapat ditemui pula untuk permohonan kredit, karena jumlah kredit yang diberikan oleh kreditor sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Usaha untuk mengurangi fluktuasi laba adalah suatu bentuk manipulasi laba agar jumlah laba suatu periode tidak terlalu berbeda dengan jumlah laba periode sebelumnya. Oleh karena itu perataan laba (*income smoothing*) meliputi penggunaan teknik-teknik tertentu untuk memperkecil atau memperbesar jumlah laba suatu periode agar mendekati jumlah laba pada periode sebelumnya.

Beattie *et al.* (1994) menguji *earnings management* dengan pola *income smoothing* yang mengaitkan *earnings management* dengan *accounting risk, market risk, agency cost, political cost, ownership structure* dan *industry*. Beattie *et al.* memprediksi bahwa hubungan antara *smoothing index* dan risiko adalah positif, artinya semakin besar risiko maka semakin besar pula *smoothing index* dan semakin

kecil risiko maka semakin kecil pula *smoothing index* nya. Dengan kata lain, kecenderungan manajemen untuk melakukan *income smoothing* tergantung pada besar kecilnya risiko. Hasil penelitian mereka mendukung hipotesis bahwa risiko akuntansi mempunyai hubungan yang signifikan dengan *smoothing index*. Prediksi lainnya adalah hubungan antara *income smoothing* dan *agency cost*. Beattie *et al.* menggunakan 3 buah variabel untuk memproksikan *agency cost* yaitu *devidend cover*, *gearing* dan *managerial holdings of share options*. Beattie *et al.* memprediksikan adanya hubungan negatif antara *smoothing* dan *devidend cover*, hubungan positif antara *smoothing* dan *gearing*, dan hubungan positif antara *smoothing* dan *level of managerial holdings of share options*. Hasil penelitian mereka mendukung hipotesis-hipotesis di atas. Kemudian prediksi lainnya adalah hubungan antara *smoothing* dan *political cost* yang dihipotesiskan mempunyai hubungan positif. Namun bukti empiris menunjukkan hubungan dua variabel tersebut tidak terbukti signifikan. Untuk hubungan antara *smoothing* dengan *ownership structure* diprediksikan negatif. Bukti empiris yang diperoleh sesuai dengan prediksi mereka dalam arti semakin tersebar kepemilikan, semakin besar pula kecenderungan manajemen untuk melakukan *income smoothing*.

2.2. Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) sebagaimana dikutip oleh Sugiri (2000) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajemen (sebagai

agen) dengan pemiliknya (sebagai prinsipal). Hubungan keagenan yang terjadi antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) membebankan tanggungjawab atau mendelegasikan otoritas kepada agen untuk melaporkan kinerjanya kepada prinsipal dalam bentuk laporan keuangan.

Oleh karena sebagai pihak yang menyediakan informasi keuangan dan secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, maka manajemen akan cenderung untuk melaporkan segala sesuatu yang dapat memaksimumkan utilitas dirinya. Seperti yang telah diketahui yang menjadi fokus perhatian pihak eksternal adalah laba (*earnings*). Dengan adanya ketidaksimetri informasi (dimana satu pihak mampu untuk mengakses informasi yang relevan sedangkan pihak lain tidak mampu untuk melakukannya) maka akan semakin mendorong agen (manajemen) untuk lebih leluasa menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal yaitu dengan merekayasa informasi akuntansi.

Meskipun hubungan keagenan hanya merupakan hubungan antara agen dengan prinsipal namun teori keagenan bukan hanya membahas hubungan antara agen dengan prinsipal saja, tetapi mencakup semua usaha untuk menjelaskan laporan keuangan. Anggapan yang melekat pada teori keagenan adalah bahwa terdapat konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal. Konflik tersebut terjadi karena pada dasarnya setiap individu akan berusaha untuk memaksimumkan utilitasnya sendiri, sehingga ada alasan untuk percaya bahwa agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaiknya prinsipal

(Jensen dan Meckling, 1976). Berarti dalam hal ini terdapat ketidakselarasan perilaku atau tujuan antara prinsipal dengan agen, yang disebut sebagai *dysfunctional behavior*.

Konflik kepentingan yang terjadi antara agen dengan prinsipal akan mendorong timbulnya *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976), yang bukan hanya ditanggung oleh prinsipal saja tetapi agenpun menanggungnya. *Agency cost* ini meliputi: (1) *Monitoring cost* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen agar tidak menyimpang dari yang diinginkan oleh prinsipal, misalnya biaya untuk mengukur dan mengawasi perilaku agen, biaya untuk menyusun sistem kompensasi dan lain-lain; (2) *Bonding cost* yaitu pengeluaran agen untuk menjamin bahwa dia akan bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, misalnya kesediaan manajer untuk menyewa auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya; (3) *Residual loss* yaitu pengaruh dari perbedaan antara tindakan yang diinginkan oleh prinsipal dengan tindakan yang diambil oleh agen. *Residual loss* ini timbul karena biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi tindakan agen dan jaminan dari agen itu sendiri tidak menjamin bahwa tindakan agen akan sesuai dengan tindakan yang diinginkan oleh prinsipal.

Salah satu konflik kepentingan yang terjadi antara pihak intern dengan ekstern adalah antara manajemen dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemilik sumber daya yang dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya, bertindak sebagai prinsipal, sedangkan perusahaan sebagai pengelola atau yang memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan *profit*, bertindak

sebagai agen. Oleh karena itu pihak manajemen sebagai agen berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya yaitu yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pihak manajemen sebagai pihak yang mempunyai akses langsung dan juga sekaligus sebagai pihak yang terlebih dahulu mengetahui terhadap informasi keuangan, cenderung manajemen untuk memaksimumkan utilitas dirinya yaitu dengan merekayasa laporan keuangan yang disusunnya dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

2.3. Perubahan atas Undang-Undang Perpajakan

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* dapat dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara, untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihannya untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian pajak merupakan sumber kekuatan pembangunan karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor ini. Melalui pajak ini, pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Oleh karena itu sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah *full self assessment systems* (Mardiasmo, 1996) yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Jadi wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Pada tahun 1994 pemerintah mengadakan perubahan dan telah mengesahkan empat Undang-Undang perubahan perpajakan, di mana salah satunya adalah Undang-Undang No.10 tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 1991.

Adapun latar belakang dari adanya perubahan ini adalah dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi di berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk aktivitas yang aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang selama ini berlaku (Undang-Undang tahun 1994).

Salah satu perubahan yang diatur adalah mengenai kebijakan di bidang tarif pajak penghasilan yaitu dengan mengatur kembali besarnya lapisan penghasilan kena pajak dan besarnya lapisan tarif dengan tetap mempertahankan sifat progresivitas tarif, yang diberlakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pengaturan kembali tarif tersebut juga dengan mempertimbangkan kesempatan melakukan pengembangan kegiatan usaha dan persaingan dunia usaha dalam era globalisasi.

Adapun tarif pajak yang baru ditetapkan adalah sebagai berikut :

| <u>Penghasilan Kena Pajak</u> | <u>Tarif</u> |
|--|--------------|
| Sampai dengan Rp. 25 juta | 10% |
| Diatas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta | 15% |
| Diatas Rp. 50 juta | 30% |

Dibandingkan dengan tarif yang lama, tarif yang baru ini jelas memberikan penurunan atas jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan dapat menghemat atas sejumlah pajak.

2.4. Kebijakan Akuntansi Akrual

Seperti yang telah diketahui, bahwa dalam akuntansi menganut prinsip *accrual basis*. *Accrual basis* ini terdiri dari atau disebut juga dengan *accruals* dan *deferrals*, yaitu pendapatan (beban) diakui berdasarkan pada hak (kewajiban) bukan pada saat penerimaan (pengeluaran) kas. Secara akuntansi, dasar ini mewajibkan perusahaan untuk mengakui pendapatan (beban) yang sudah menjadi hak (kewajiban) pada periode sekarang meskipun transaksi kasnya baru terjadi pada periode berikutnya dan menunda pengakuan pendapatan (beban) yang belum menjadi hak (kewajiban) sampai periode berikutnya meskipun transaksi kasnya sudah terjadi pada periode sekarang. Di lain pihak secara perpajakan, pengakuan beban dan pendapatan harus pada periode dimana benar-benar telah ada penerimaan dan pengeluaran kas.

Dengan memanipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual merupakan suatu cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba, namun sukar untuk dideteksi (Kiswara, 1999). Penelitian yang dilakukan oleh Dechow, Sweeney dan Sloan (1995) mengevaluasi berbagai model alternatif berbasis akrual yang mendeteksi adanya manajemen laba yaitu dengan mengukur dari kebijakan akrualnya.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba yaitu melalui penggunaan akrual maupun perubahan metode akuntansi. Penggunaan akrual yang dimaksud disini yaitu dengan mengendalikan transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

Transaksi akrual adalah transaksi yang tidak mempengaruhi aliran kas masuk ataupun aliran kas keluar, seperti misalnya pengakuan atas piutang pendapatan ataupun hutang biaya. Transaksi akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu transaksi yang bersifat *non-discretionary* (biasanya disebut *non-discretionary accrual*) dan yang bersifat *discretionary* (biasanya disebut *discretionary accrual*).

Transaksi yang bersifat *non-discretionary* (yang bukan merupakan kebijakan atau mengubah metode akuntansi) adalah transaksi yang dicatat dengan menggunakan suatu prosedur tertentu, di mana manajemen diharapkan konsisten pada prosedur yang telah dipilih tersebut. Sebagai contoh adalah penggunaan metode depresiasi dan metode penilaian persediaan, manajer sangat diharapkan untuk konsisten pada metode yang telah dipilih karena akan mempengaruhi laba perusahaan pada suatu periode.

Transaksi yang bersifat *discretionary* memberikan kebebasan kepada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel. Sebagai contoh adalah menaikkan persediaan, menurunkan jumlah piutang tak tertagih dari tahun sebelumnya sehingga jumlah piutang netto akan naik, ataupun menggeser periode beban atau pendapatan.

Dalam hubungannya dengan perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 khususnya mengenai perubahan tarif pajak penghasilan yang menghasilkan tarif yang menurun, maka diduga pihak manajemen perusahaan ada kecenderungan untuk menggeser periode beban atau pendapatannya yaitu dengan menangguhkan pengakuan pendapatan sampai pada periode setelah adanya perubahan dan mempercepat pengakuan beban pada periode sebelum adanya perubahan. Tujuannya adalah untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jones (1991) dalam modelnya mencoba untuk memisahkan *discretionary accrual* dengan *non-discretionary accrual* dalam total akrual sebuah perusahaan *i* dengan menggunakan regresi.

Worthy (1984) dalam Kiswara (1999) menyatakan bahwa manajemen memiliki fleksibilitas dalam memperhitungkan angka laba yang dilaporkan yang disebabkan oleh:

1. Metode akuntansi memberi peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara tertentu.
2. Metode akuntansi memberi peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektivitas dalam penyusunan estimasi.

Dengan demikian manajer memiliki wewenang untuk memilih metode akuntansi dari metode-metode alternatif yang tersedia (yang diijinkan oleh standar akuntansi keuangan). Metode-metode alternatif itu misalnya *FIFO* dan *LIFO* untuk menentukan arus biaya, garis lurus dan jumlah jam jasa untuk menentukan penyusutan dan lainnya. Penerapan standar akuntansi tersebut ada yang bersifat wajib ditaati (*mandatory*) dan ada yang bersifat manajemen dapat bebas untuk memilih (*voluntary*).

Dengan adanya metode-metode alternatif diatas akan menyebabkan *earnings* menjadi berbeda apabila metode yang digunakan berbeda pula, sehingga manajer dapat memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan dan yang dapat menjadikan posisi manajer lebih baik dengan mengorbankan (sebagian) pihak yang lain (Watts dan Zimmerman, 1990).

Pada akhirnya dasar akrual yang disyaratkan oleh standar akuntansi banyak dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan *earnings management* sesuai dengan insentif dan motivasinya. Fleksibilitas yang dimungkinkan oleh akuntansi sendiri yang pada akhirnya menjadikan tindakan ini sah dengan sendirinya atau dapat dikatakan bahwa *earnings management* dapat terjadi karena kelemahan yang ada pada standar akuntansi itu sendiri.

2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu Atas Manajemen Laba.

Sebenarnya masalah penyajian laporan keuangan yang *window dressing* telah ada sejak dulu. Masalah ini timbul juga karena adanya teori keagenan antara agen dengan prinsipal. Beberapa penelitian mengenai perilaku manajemen laba ini telah banyak dilakukan di luar negeri terutama di Amerika. Berikut ini akan dipaparkan beberapa diantaranya adalah :

Cahan (1992) serta Naim dan Hartono (1996) menemukan bahwa perusahaan yang menghadapi investigasi pelanggaran undang-undang *antitrust* atau praktik monopoli akan berusaha menurunkan labanya dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi denda akibat tuduhan pelanggaran undang-undang *antitrust*.

Frankel dan Trezervant (1994) membuktikan bahwa penurunan tarif pajak (yang terjadi di US pada tgl 1 Juli 1987 atau yang dikenal dengan istilah *Tax Reform Act*) akan memotivasi manajer untuk merekayasa laba akuntansi. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa manajer perusahaan menerapkan asumsi persediaan *LIFO* dan melakukan pembelian persediaan ekstra satu tahun sebelum berlakunya *TRA*. Dengan metode *LIFO*, pembelian pada akhir tahun akan dibebankan sebagai harga pokok penjualan pada tahun berjalan. Oleh karena itu pembelian persediaan ekstra yang dilakukan pada akhir tahun akan memperbesar harga pokok penjualan dan menurunkan laba. Penurunan laba ini akan berdampak pada pengurangan beban pajak yang dibayar.

Healy (1985) sebagaimana dikutip oleh Sugiri (2000) mendapatkan bukti bahwa

penggunaan angka akuntansi dalam kontrak bonus memicu manajer untuk menyesuaikan tingkat laba agar dapat memaksimumkan bonus yang dia peroleh. Penelitian Healy ini dapat dihubungkan dengan pola *taking a bath* dan dia menemukan bahwa laba dalam suatu periode akuntansi yang lebih rendah dari target laba dapat memotivasi manajer untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam periode tersebut dan mentransfer laba tersebut ke periode berikutnya dengan harapan akan mendapatkan bonus dalam periode berikutnya.

DeFond dan Jiambalvo (1994) menguji *debt equity hypothesis* dengan menganalisa tingkat akrual dari 94 perusahaan yang melanggar perjanjian hutang. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa pada satu periode sebelum pelanggaran perjanjian hutang, perusahaan akan merekayasa akrual (yang disebut dengan *abnormal accrual* dan terbukti positif dan signifikan) yaitu dengan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk meminimalkan kerugian akibat pelanggaran perjanjian kredit.

Sweeney (1994) juga menguji mengenai *debt covenant hypothesis* dan hasil penelitiannya konsisten dengan hasil penelitian DeFond dan Jiambalvo (1994). Sweeney mengevaluasi perubahan metode akuntansi dari 130 perusahaan yang melanggar perjanjian kredit. Perubahan metode akuntansi yang teridentifikasi olehnya adalah perubahan metode depresiasi, perubahan *FIFO* dan *LIFO*, perubahan umur ekonomis aktiva dan perubahan dalam alokasi biaya *overhead*.

Hunt (1985) dan Niehaus (1989) mengevaluasi bahwa perusahaan yang

menerapkan asumsi LIFO dapat menyebabkan timbulnya konflik antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan LIFO dapat merugikan manajer tetapi sebaliknya mendatangkan keuntungan bagi pemegang saham. Mereka berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengurangi konflik tersebut adalah apabila manajer juga mempunyai tingkat kepemilikan yang besar dalam perusahaan tersebut.

Guenther (1994) juga mencoba mengevaluasi pengaruh publikasi *Tax Reform Act* terhadap perusahaan di Amerika. Hipotesis yang diajukan olehnya adalah akan terjadi penurunan laba yang ditandai dengan negatif *accruals* oleh perusahaan-perusahaan satu periode sebelum berlakunya TRA 1986. Kemudian hipotesis berikutnya adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang tahun fiskalnya Juni akan melakukan penurunan akrual pada satu periode sebelum berlakunya TRA, perusahaan-perusahaan dengan *firm size* yang besar akan mempunyai *current accruals* negatif, perusahaan-perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan mempunyai *current accruals* positif dan perusahaan-perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajemen yang tinggi akan mempunyai *current accruals* negatif. Dia tidak berhasil membuktikan bahwa satu periode sebelum berlakunya TRA 1986, perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimumkan penghematan pajak, tetapi dia berhasil membuktikan adanya hubungan yang negatif bagi perusahaan dengan *firm size* besar, hubungan positif bagi perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi, kecuali untuk hipotesis yang perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi,

berhubungan dengan tingkat kepemilikan manajemen hasil yang diperoleh menunjukkan tidak adanya hubungan yang negatif.

Jones (1991) meneliti 23 perusahaan dari 5 industri yang sedang mengalami investigasi import oleh *United States International Trade Commission (ITC)*, dan dia mendapati bahwa manajer (dalam hal ini produsen domestik) yang menghadapi investigasi import relief melakukan penurunan laba selama masa investigasi untuk mendapatkan proteksi import.

Di Indonesia sendiri sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian mengenai manajemen laba ini belum banyak dilakukan, diantaranya adalah yang dilakukan oleh Kiswara (1999), Setiawati (1999) dan Sutanto (2000). Kiswara (1999) dalam penelitiannya menguji faktor-faktor yang diduga dapat mengindikasikan keberadaan unsur manajemen laba yaitu ukuran perusahaan (*firm size*), jenis penanaman modal dan klasifikasi industri. *Proxy* yang digunakan untuk mengindikasikan adanya unsur manajemen laba adalah kebijakan akuntansi akrual. Hasil yang diperoleh adalah bahwa dari ketiga faktor tersebut yang diduga dapat mengindikasikan keberadaan unsur manajemen laba, ternyata hanya satu faktor saja yang berpengaruh yaitu klasifikasi industri sedangkan dua faktor lainnya tidak.

Setiawati (1999) dalam penelitiannya mengevaluasi perilaku manajemen laba dalam industri perbankan di Indonesia. *Proxy* yang digunakannya adalah *discretionary accrual*. Hipotesis yang diajukan olehnya adalah bahwa bank yang mengalami

penurunan tingkat kesehatan akan melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba dan tingkat *discretionary accruals* bank yang mengalami penurunan tingkat kesehatan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat *discretionary accruals* bank yang tidak mengalami penurunan tingkat kesehatan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *discretionary accruals* bank yang mengalami penurunan kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *discretionary accruals* bank yang tidak mengalami penurunan kesehatan. Temuan ini mengindikasikan adanya manajemen laba oleh bank yang mengalami penurunan tingkat kesehatan.

Sutanto (2000) dalam penelitiannya menguji apakah laba yang dilaporkan sebelum mempublik menunjukkan peningkatan yang relatif dibandingkan dengan kondisi setelah mempublik dan apakah perusahaan yang melakukan IPO intensitas penggunaan *discretionary accrual* lebih tinggi untuk laporan keuangan prospektusnya daripada laporan keuangan tahunan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa manajer perusahaan yang melakukan IPO menggunakan *discretionary accruals* untuk meningkatkan laba akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan prospektus.

2.6. Pengembangan Hipotesis

Scholes *et al.*, 1992; Guenther, 1994; Maydew, 1997 menunjukkan bahwa seringkali perusahaan mencoba untuk mengatur *accounting accruals* untuk memperoleh keuntungan dari adanya perubahan tarif pajak. Dalam hal pengakuan pendapatan yang

tinggi dan beban yang rendah, kedua-duanya akan menaikkan laba perusahaan dan jumlah hutang pajak perusahaan. Oleh karena itu akan timbul perencanaan terhadap pajak untuk pelaporan keuangan. Frankel dan Trezervant (1994) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak akan memotivasi manajer untuk melakukan rekayasa laba akuntansi yang menurunkan laba yaitu dengan melakukan pembelian persediaan ekstra 1 tahun sebelumnya bagi perusahaan yang menerapkan asumsi LIFO. Guenther (1994) mengatakan bahwa dengan menurunkan *current assets* untuk menangguhkan pendapatan atau dengan menaikkan *current liabilities* untuk mempercepat beban maka akan menyebabkan *accruals* menjadi negatif. Hal ini dapat memberikan dampak bahwa perusahaan akan cenderung untuk menurunkan labanya agar dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Rekayasa untuk menurunkan laba akan diindikasikan oleh nilai *discretionary accrual* yang lebih rendah daripada rekayasa untuk menaikkan laba yang *discretionary accrual* nya lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut :

H1 : *Discretionary accrual* setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan lebih tinggi daripada sebelum perubahan Undang-Undang Perpajakan.

Watts dan Zimmerman (1978) menyatakan bahwa dukungan maupun penentangan terhadap suatu rencana standar akuntansi sangat tergantung pada ukuran perusahaan (*firm size*). Hal ini dapat memberikan dampak terhadap peningkatan atau penurunan dari laba yang dilaporkan, yaitu bahwa perusahaan besar akan cenderung

mendukung standar akuntansi yang akan memberikan pengurangan terhadap laba yang dilaporkan, mengingat manfaat perpajakan, sedangkan bagi perusahaan kecil hal ini kurang memberikan manfaat sehingga mereka cenderung menentang standar tersebut karena akan membawa dampak buruk bagi kinerja perusahaannya. Jika perusahaan mencoba untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dengan cara menangguhkan pendapatan, maka perusahaan tersebut juga akan mengurangi laba dalam laporan keuangannya, sehingga diharapkan perusahaan besar akan lebih cenderung untuk mengurangi laba dalam laporan keuangan daripada perusahaan kecil (Guenther, 1994).

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut :

H2 : Ukuran perusahaan akan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *discretionary accrual*.

DeFond dan Jiambalvo (1994) menyatakan bahwa perusahaan cenderung menaikkan laba untuk menghindari *debt covenant violations*. Hal ini terjadi karena manajemen cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian akibat pelanggaran perjanjian kredit. Watts dan Zimmerman (1986) dalam *debt covenant hypothesis* mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka manajemen perusahaan akan lebih memilih metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaannya, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang dekat dengan *debt covenant violations* (cenderung melanggar perjanjian kredit). Perusahaan yang menaikkan tingkat hutangnya

(*debt level*) untuk memperoleh pengurangan beban bunga yang lebih besar akan cenderung untuk tidak mengurangi kenaikan labanya karena tambahan kenaikan beban bunga tersebut akan memperkecil atau mengurangi kenaikan laba tersebut sehingga juga akan mengurangi jumlah pajak yang dibayar (Guenther, 1994). Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut :

H3 : Tingkat hutang akan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *discretionary accrual*.

Beattie *et al.* (1994) menyatakan bahwa hubungan antara *smoothing* dan *ownership structure* adalah negatif, sehingga semakin tersebar kepemilikan, semakin besar pula kecenderungan manajemen untuk melakukan *income smoothing*. Hunt (1985) dan Niehaus (1989) menyatakan bahwa apabila perusahaan menerapkan metode LIFO, dapat menyebabkan terjadinya konflik antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan LIFO dapat merugikan manajer, tetapi sebaliknya mendatangkan keuntungan bagi pemegang saham (adanya penghematan pajak). Mereka berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengurangi konflik ini adalah apabila manajer juga mempunyai tingkat kepemilikan yang besar dalam perusahaan tersebut. Guenther (1994) juga mencoba untuk melihat hal yang sama yaitu bahwa sebagai respon dari perubahan tarif pajak maka perusahaan akan menangguhkan labanya menurut pajak, sehingga perusahaan yang tingkat kepemilikan manajemennya tinggi cenderung untuk merubah laba perusahaannya dengan tujuan

untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut :

H4 : Tingkat kepemilikan manajemen akan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *discretionary accrual*.

BAB III

Metodologi Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Periode pengamatan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 tahun yaitu dari tahun 1992 sampai dengan 1997. Diambilnya periode pengamatan selama 6 tahun ini bertujuan untuk melihat konsistensi maupun perubahan atau pergeseran perilaku data. Perusahaan yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 1991 sampai dengan 1997. Alasan peneliti hanya mengambil perusahaan manufaktur saja adalah dengan pertimbangan agar adanya keseragaman atau kesejenisan antara variabel-variabel yang dipakai seperti misalnya biaya penyusutan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, di mana dalam pemilihan anggota sampel ini didasarkan pada beberapa kriteria tertentu yaitu :

1. Terdaftar di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1991 sampai dengan 1997.
2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama kurun waktu 1991 sampai dengan 1997.
3. Data-data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti tersedia dengan lengkap

dalam laporan keuangan perusahaan dari tahun 1991 sampai dengan 1997.

Dengan memperhatikan kriteria diatas, maka diperoleh jumlah perusahaan manufaktur yang tetap menerbitkan laporan keuangan tahunannya selama 7 tahun berturut-turut yaitu sebanyak 95 perusahaan. Dari jumlah ini, peneliti juga mengeluarkan semua perusahaan yang selama periode 1991-1997 melakukan restrukturisasi perusahaan seperti akuisisi dan merger, dengan pertimbangan bahwa dengan adanya restrukturisasi dapat mempengaruhi variabel yang akan dipakai. Setelah melalui proses tersebut, maka jumlah perusahaan yang masuk ke dalam kriteria sampel adalah 34 perusahaan dengan total sub sampel yang meliputi 238 laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel perubahan (Δt dengan $t-1$), oleh karena itu dari 238 laporan keuangan hanya 204 laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menyusun model estimasi total *accruals* dan menguji hipotesis. Pengujian akan dilakukan secara *time-series* dengan mempertimbangkan kelengkapan kriteria diatas.

3.2. Pengumpulan Data.

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan. Data tersebut akan diperoleh dari pusat data yang terdapat di Bursa Efek Jakarta baik dari *Capital Market Directory* maupun laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh masing-masing emiten. Pengumpulan data

meliputi pos-pos : perubahan kas dan ekuivalensi kas perusahaan i pada periode ke- t , perubahan aktiva lancar perusahaan i pada periode ke- t , perubahan hutang lancar perusahaan i pada periode ke- t , perubahan hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo perusahaan i pada periode ke- t , perubahan hutang pajak penghasilan perusahaan i pada periode ke- t , dan biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada periode ke- t .

3.3. Perumusan Model

3.3.1. Total Akrual

Model pengujian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model dari Jones (1991) untuk mengukur total akrual yaitu:

$$TA_{it} = (\Delta CA_{it} - \Delta Cash_{it}) - (\Delta CL_{it} - \Delta CMLTD_{it} - \Delta ITP_{it}) - Dep_{it} \dots\dots(1)$$

TA_{it} : total akrual perusahaan i pada periode ke- t

ΔCA_{it} : perubahan aktiva lancar perusahaan i pada periode ke- t

$\Delta Cash_{it}$: perubahan kas dan ekuivalensi kas perusahaan i pada periode ke- t

ΔCL_{it} : perubahan hutang lancar perusahaan i pada periode ke- t

$\Delta CMLTD_{it}$: perubahan hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo perusahaan i pada periode ke- t

ΔITP_{it} : perubahan hutang pajak penghasilan perusahaan i pada periode ke-t

Dep_{it} : biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada periode ke-t

Total akrual tersebut dapat dipergunakan sebagai penghitungan dalam mencari proksi *discretionary accrual* yang merupakan ukuran manajemen laba.

3.3.2. Discretionary Accrual

Total akrual sebuah perusahaan dapat dipisahkan menjadi *non-discretionary accrual* dan *discretionary accrual*. Jones (1991) membuat sebuah model untuk memisahkan tingkat akrual *discretionary* dan *non-discretionary*. Model Jones tersebut adalah :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta Rev_t / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \dots (2)$$

TA_{it} : Total akrual perusahaan i pada periode t

A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

ΔRev_t : Perubahan pendapatan perusahaan i dalam periode t

PPE_t : Aktiva tetap perusahaan i periode t

ε_{it} : error term perusahaan i periode t

Dalam penelitiannya Jones menggunakan aktiva tetap dan perubahan pendapatan untuk mengontrol perubahan *non-discretionary* karena perubahan kondisi yang terjadi. Perubahan pendapatan dimasukkan ke dalam model untuk mengendalikan perubahan dalam *non-discretionary accruals* yang disebabkan oleh perubahan kondisi. Pendapatan digunakan sebagai kontrol terhadap lingkungan perusahaan karena pendapatan merupakan ukuran objektif dari operasi perusahaan sebelum manipulasi manajer (Jones, 1991). Aktiva tetap dimasukkan karena berkaitan dengan biaya depresiasi yang *non-discretionary*. Kemudian oleh Jones model tersebut dibagi dengan total aktiva tahun sebelumnya (A_{t-1}) dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) yaitu bahwa perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang (ΔRec_t), karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan secara kredit. Pengurangan terhadap nilai piutang untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar merupakan pendapatan bersih. Model modifikasi Jones untuk melakukan estimasi terhadap akrual tersebut adalah sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta Rev_t / A_{it-1} - \Delta Rec_t / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \quad \dots \dots \dots (3)$$

Seperti yang dilakukan oleh Jones (1991), penelitian ini memfokuskan pada *discretionary accrual* sebagai ukuran manajemen laba. Sedangkan *discretionary accrual* merupakan bagian dari total akrual yang tidak dapat dijelaskan oleh kegiatan normal perusahaan.

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \quad \dots \dots \dots (4)$$

Dari model pada persamaan (4) terlihat bahwa total akrual terdiri dari *non-discretionary accrual* dan *discretionary accrual*.

Untuk menentukan *non-discretionary accrual* yaitu dengan :

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta Rev_t / A_{it-1} - \Delta Rec_t / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{it-1}) \dots (5)$$

NDA_{it} = *non-discretionary accrual* perusahaan i periode ke t

Oleh karena itu jika dilihat dari persamaan (4) dan (5) maka estimasi *discretionary accruals* adalah ε_{it} (*error term*). Jadi proksi *discretionary accrual* adalah :

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - [\alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta Rev_t / A_{it-1} - \Delta Rec_t / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{it-1})]$$

DA_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i periode ke t

3.4. Identifikasi Variabel

3.4.1 Variabel dependen

Variabel dependen yang dipergunakan adalah *discretionary accrual* dan diberi

simbol DA. Variabel ini diperoleh dari hasil pengurangan antara total akrual dengan estimasi *non-discretionary accrual*.

3.4.2. Variabel independen

Ada 3 variabel independen yang dipergunakan yaitu :

1. **Ukuran perusahaan**

Variabel ukuran perusahaan ini diberi simbol SIZE. Variabel ini diukur dengan menggunakan nilai total aktiva perusahaan.

2. **Tingkat hutang perusahaan**

Variabel ini diberi simbol DEBT dan diukur dengan menggunakan *debt equity ratio*.

3. **Tingkat kepemilikan manajemen**

Variabel ini diberi simbol OWN. Variabel ini diperoleh dengan melihat proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen.

Untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen tersebut yang secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, maka digunakan persamaan regresi sebagai berikut :

$$DA = a + b_1 \text{SIZE} + b_2 \text{DEBT} + b_3 \text{OWN} + e$$

a = *intercept*

DA = *Discretionary accrual*

SIZE = Ukuran perusahaan

DEBT = Tingkat hutang perusahaan

OWN = Tingkat kepemilikan manajemen

3.5. Metoda Analisis

3.5.1. Analisis Deskriptif

Untuk menguji hipotesis 1, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai total akrual yaitu dengan cara memasukkan rekening-rekening laporan keuangan seperti dalam model (1). Kemudian nilai total akrual ini akan dimasukkan ke dalam model regresi untuk menentukan nilai estimasi *non-discretionary accrual*. Di sini kita membagi menjadi 2 bagian yaitu periode sebelum perubahan dan setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan. Untuk masing-masing periode dilakukan regresi untuk menentukan nilai *non-discretionary accrual*. Setelah itu baru dapat ditentukan nilai *discretionary accrual*nya. Apabila perusahaan tidak melakukan manajemen laba maka akan ditunjukkan bahwa total akrual akan sama dengan *non-discretionary accrual*. Oleh karena itu *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi adanya manajemen laba. Apabila perusahaan diindikasikan melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba setelah perubahan Undang-Undang yang baru maka nilai *discretionary accrual*nya akan lebih tinggi daripada sebelum adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya untuk menguji hipotesis 2,3 dan 4 digunakan regresi berganda yaitu untuk

mengetahui apakah tindakan manajemen laba dapat dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan serta tingkat kepemilikan manajemen.

Langkah berikutnya adalah sebelum melakukan pengujian terhadap persamaan regresi dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penggunaan model regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah bebas dari atau menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik. Gujarati (1995) menyatakan bahwa dalam pengujian asumsi klasik ini yang dianggap penting adalah tidak terjadinya multikolinieritas antar variabel independen, tidak terjadinya heteroskedastisitas dan tidak terjadinya autokorelasi antar residual setiap variabel independen.

Multikolinieritas adalah adanya hubungan yang kuat antar variabel-variabel independen dalam persamaan regresi. Adanya multikolinieritas ini akan mengakibatkan ketidak tepatan estimasi yang mengarahkan pada kesimpulan menerima hipotesis nol (Gujarati, 1995). Gejala multikolinieritas ini dapat dideteksi dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*). Semakin besar nilai VIF maka akan semakin tinggi kolinieritas antar variabel independen. Jika nilai $VIF = 1$ menunjukkan tidak adanya kolinieritas antar variabel independen. Jika nilai $VIF < 10$ maka tingkat multikolinieritasnya belum tergolong bahaya.

Heteroskedastisitas adalah variabel pengganggu (e_i) yang memiliki varian yang berbeda antara satu observasi dengan observasi yang lain atau varian antar independen

variabel tidak sama. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi digunakan *Spearman Rank Correlation* dengan program SPSS. Model regresi akan homokedastik bila angka korelasi *rank spearman* tidak melebihi 0,5.

Autokorelasi adalah adanya hubungan antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data *time-series*. Untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi ini digunakan *Durbin-Watson d Statistic Test*. Jika $0 < d < d_l$ atau $d_u < d < d_u$, maka tidak terdapat autokorelasi positif dalam model regresi. Tetapi jika $4-d_l < d < 4$ atau $4-d_u < d < 4-d_u$, maka tidak terdapat autokorelasi negatif, sedangkan jika $d_u < d < 4-d_u$, maka tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif dalam model regresi (Gujarati, 1995).

3.5.2. Uji Statistik

Berikut ini adalah tahap-tahap pengujian statistik yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk dapat menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak yaitu sebagai berikut :

1. Mengestimasi nilai *non-discretionary accrual*

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi yang akan dibagi dalam 2 tahap yaitu pertama kita melakukan regresi pada periode sebelum adanya perubahan Undang-Undang dan tahap kedua adalah regresi pada periode setelah adanya perubahan Undang-Undang. Kedua tahap tersebut dilakukan untuk mengestimasi nilai *non-discretionary accrual*. Selanjutnya nilai

discretionary accrual untuk masing-masing periode dapat diperoleh dari total-akrual dikurangi dengan estimasi *non-discretionary accrual*.

2. Uji beda *Discretionary accrual*

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya yaitu dengan melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara *discretionary accrual* pada periode sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan maka diindikasikan perusahaan melakukan manajemen laba sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru yaitu dengan ditunjukkannya nilai *discretionary accrual* yang lebih rendah pada periode sebelum adanya perubahan Undang-Undang.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Paired samples t-test*.

3. Menguji pengaruh dari variabel ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan dan tingkat kepemilikan manajemen terhadap *discretionary accrual*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi berganda.

BAB IV

Hasil dan Analisis Data

4.1. Analisis Data

Sebagaimana telah diulas dalam Bab III, analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan model persamaan regresi berganda dan uji beda.

4.1.1. Periode sebelum adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai total akrual. Nilai total akrual ini akan dijadikan sebagai variabel dependen. Setelah itu baru dilakukan regresi untuk menentukan nilai estimasi *non-discretionary accrual*. Sebelumnya untuk dapat memenuhi syarat pengujian regresi maka harus dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik.

4.1.1.1. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen dalam model persamaan regresi. Uji ini dilakukan untuk

tiap-tiap variabel dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) seperti yang terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

| | VIF | Kesimpulan |
|---------------------------------|-------|-------------------------|
| PPE dibagi total aktiva t-1 | 1,049 | Tidak terdapat Multikol |
| REV-REC dibagi total aktiva t-1 | 1,049 | Tidak terdapat Multikol |

Berdasarkan hasil pada tabel 1 di atas terlihat bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah kurang dari 10 yaitu berkisar pada angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat problem multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Durbin-Watson d Statistic Test*. Sebagai *rule of thumb* Gujarati (1995) menyatakan bahwa jika $d_u < d < 4-d_u$, maka tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif dalam model regresi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

| Durbin Watson | D_u | $4-d_u$ | Kesimpulan |
|---------------|-------|---------|-----------------------------|
| 1,953 | 1,72 | 2,28 | Tidak terdapat Autokorelasi |

Nilai Durbin-Watson adalah 1,953. Berdasarkan pada tabel DW dengan menggunakan

$n = 102$ dan parameter $k = 2$ diperoleh nilai $d_u = 1,72$ dan nilai $d_l = 1,63$. Dengan demikian maka nilai $d_u < d < 4-d_u$ adalah $d_u (1,72) < d (1,953) < 4-d_u (2,28)$. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini akan digunakan *Spearman Rank Correlation*. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Nilai Korelasi |
|---------------------------------|----------------|
| PPE dibagi total aktiva t-1 | 0,127 |
| REV-REC dibagi total aktiva t-1 | -0,009 |

Berdasarkan hasil pada tabel 3 di atas, nilai korelasi *Spearman* dari semua variabel terhadap e berada di bawah 0,5. Hal ini berarti bahwa variabel yang akan dimasukkan dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini juga didukung oleh Jones yang dalam modelnya sudah memasukkan total aktiva tahun sebelumnya sebagai pembagi pada semua variabel yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh heteroskedastisitas.

4.1.1.2. Estimasi Non-discretionary accrual dengan model Jones yang dimodifikasi

Jones (1991) menyusun sebuah model untuk memisahkan tingkat akrual yang *discretionary* dari tingkat akrual yang *non-discretionary*. Dalam penelitiannya Jones menggunakan aktiva tetap dan perubahan pendapatan untuk mengontrol perubahan *non-discretionary accrual* yang disebabkan oleh perubahan kondisi. Kemudian model tersebut dibagi dengan total aktiva tahun sebelumnya (A_{it-1}) untuk mengurangi tingkat heteroskedastisitas.

Tetapi dalam penelitian ini model yang dipergunakan adalah model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995). Menurut Dechow, Sloan dan Sweeney perubahan pendapatan harus disesuaikan dengan perubahan piutang. Pengurangan terhadap nilai piutang ini untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar merupakan pendapatan bersih. Oleh karena itu model modifikasi Jones yang dipergunakan untuk melakukan estimasi terhadap akrual adalah :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta Rev_t / A_{it-1} - \Delta Rec_t / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

Tabel 4. Hasil Estimasi Non-Discretionary Accrual dengan model Jones yang dimodifikasi

| Variabel independen | Koefisien | Sig-t |
|---------------------|-----------|---------------|
| REV-REC | 0,07042 | 0,276 |
| PPE | -0,09000 | 0,014 |
| F = 3,318 | | Sig F = 0,040 |

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan F adalah sebesar 0,040.

Hal ini berarti bahwa model yang dipergunakan dapat dipakai untuk memisahkan nilai *discretionary accrual* dari total akrual. Dari regresi tersebut akan diambil nilai koefisiennya untuk menentukan besarnya *non-discretionary accrual* yang nantinya akan dipergunakan sebagai pengurang dari total akrual untuk mencari *discretionary accrual*.

4.1.2. Periode setelah adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan

Seperti yang telah dilakukan sebelumnya maka untuk dapat melakukan pengujian regresi terlebih dahulu harus diadakan pengujian asumsi klasik.

4.1.2.1. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Pada tahap periode ini, hasil uji Multikolinieritas yang diperoleh seperti terlihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

| | VIF | Kesimpulan |
|---------------------------------|-------|-------------------------|
| PPE dibagi total aktiva t-1 | 1,228 | Tidak terdapat Multikol |
| REV-REC dibagi total aktiva t-1 | 1,228 | Tidak terdapat Multikol |

Berdasarkan hasil pada tabel 5 di atas terlihat bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen adalah kurang dari 10 yaitu berkisar pada angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat problem multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Demikian pula untuk hasil uji Autokorelasi yang diperoleh seperti terlihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

| Durbin Watson | D_u | $4-d_u$ | Kesimpulan |
|---------------|-------|---------|-----------------------------|
| 2,003 | 1,72 | 2,28 | Tidak terdapat Autokorelasi |

Nilai Durbin-Watson adalah 2,003. Berdasarkan pada tabel DW dengan menggunakan $n = 102$ dan parameter $k = 2$ diperoleh nilai $d_u = 1,72$ dan nilai $d_l = 1,63$. Dengan demikian maka nilai $d_u < d < 4-d_u$ adalah $d_u (1,72) < d (2,003) < 4-d_u (2,28)$. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk uji heteroskedastisitas hasil yang diperoleh seperti terlihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Nilai Korelasi |
|---------------------------------|----------------|
| PPE dibagi total aktiva t-1 | 0,214 |
| REV-REC dibagi total aktiva t-1 | -0,046 |

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai korelasi Spearman dari semua variabel terhadap e berada di bawah 0,5. Hal ini berarti bahwa variabel yang akan dipergunakan dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.1.2.2. Estimasi Non-discretionary accrual dengan model Jones yang dimodifikasi

Pada tahap periode setelah adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan, dilakukan pengujian regresi kembali untuk menentukan nilai estimasi dari *non-discretionary accrual*.

Tabel 8. Hasil Estimasi Non-Discretionary Accrual dengan model Jones yang dimodifikasi

| Variabel independen | Koefisien | Sig-t |
|---------------------|-----------|---------------|
| REV-REC | -0,01224 | 0,835 |
| PPE | -0,132 | 0,000 |
| F = 20,162 | | Sig F = 0,000 |

Dari hasil regresi yang diperoleh terlihat bahwa nilai signifikan F adalah sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan kemampuan model untuk dapat menjelaskan nilai estimasi. Seperti halnya pada periode sebelum adanya perubahan Undang-undang, maka dari regresi ini akan diambil nilai koefisiennya untuk menentukan besarnya nilai *non-discretionary accrual* yang akan dipergunakan dalam mencari nilai *discretionary accrual*.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Uji beda Discretionary Accrual

Setelah dilakukan pengujian regresi untuk menentukan nilai estimasi *non-discretionary accrual*, maka akan diperoleh nilai *discretionary accrual* yang akan

dipergunakan sebagai proksi dari manajemen laba.

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa perilaku manajemen laba oleh perusahaan-perusahaan dapat dilihat dari perbedaan tingkat *discretionary accrual* pada periode sebelum adanya perubahan Undang-Undang dengan setelah adanya perubahan Undang-Undang. Jika memang perusahaan melakukan tindakan tersebut maka hal ini akan diindikasikan oleh tingkat *discretionary accrual* yang lebih tinggi pada periode setelah adanya perubahan Undang-Undang karena perusahaan akan cenderung untuk menggeser labanya pada periode setelah adanya perubahan Undang-Undang (disebabkan oleh menurunnya tarif yang baru).

Hipotesis tersebut diuji dengan melihat perbedaan tingkat *discretionary accrual* antara periode sebelum dan setelah adanya perubahan Undang-Undang. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan maka perusahaan-perusahaan telah melakukan manajemen laba sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru. Akan tetapi jika tanpa manajemen laba, maka nilai total akrual akan sama dengan nilai *non-discretionary accrual* dan *discretionary accrual* akan sama dengan nol.

Untuk itu peneliti membagi dua kelompok yaitu *discretionary accrual* sebelum perubahan Undang-Undang dan *discretionary accrual* setelah perubahan Undang-Undang, sedangkan alat uji yang digunakan adalah uji beda (*paired samples t-test*). Hasil yang diperoleh seperti yang terlihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Hasil uji beda rata-rata Discretionary Accrual

| Periode | N | Rata-rata |
|----------------------|-----|-----------|
| Sebelum perubahan UU | 102 | 0,01078 |
| Setelah perubahan UU | 102 | 0,03772 |
| Sig = 0,081 | | |

Dari hasil yang diperoleh terhadap uji beda rata-rata *discretionary accrual* menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara periode sebelum adanya perubahan dengan setelah adanya perubahan yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,081 pada taraf signifikansi 0,1. Rata-rata *discretionary accrual* pada periode setelah adanya perubahan mempunyai nilai sebesar 0,03772, relatif lebih tinggi daripada rata-rata *discretionary accrual* pada periode sebelum adanya perubahan yang mempunyai nilai sebesar 0,01078. Dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan dapat diterima. Hal ini berarti bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan yang baru, praktik manajemen laba masih tetap dilakukan oleh perusahaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Frankel dan Trezervant (1994). Mereka berhasil membuktikan bahwa reduksi tingkat pajak tersebut (TRA) merupakan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba akuntansi. Temuan mereka adalah bahwa manajer perusahaan yang menerapkan asumsi persediaan LIFO, melakukan pembelian persediaan ekstra satu tahun sebelum berlakunya TRA karena dengan metode LIFO, pembelian pada akhir tahun akan dibebankan sebagai harga pokok penjualan pada tahun

berjalan. Dalam kondisi normal (harga-harga cenderung naik), pembelian persediaan ekstra pada akhir tahun akan memperbesar nilai harga pokok penjualan dan menurunkan laba.

Tetapi berbeda dengan hasil yang diperoleh dari penelitiannya Guenther (1994) yang mencoba untuk mengevaluasi pengaruh dari *Tax Reform Act 1986* yang terjadi di Amerika Serikat. Guenther tidak berhasil membuktikan bahwa satu periode sebelum berlakunya TRA 1986, perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimumkan penghematan pajak.

4.2.2 Hasil Analisis Regresi atas Variabel-variabel Independen

Sebelumnya telah dilakukan pengujian asumsi klasik kembali dan dari hasil yang diperoleh tidak ditemukan adanya penyimpangan. Untuk hasil yang diperoleh seperti terlihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Hasil pengujian asumsi klasik atas variabel-variabel independen

| Variabel independen | VIF | Nilai Korelasi |
|---------------------|-------|----------------|
| SIZE | 1,295 | -0,069 |
| DEBT | 1,345 | 0,013 |
| OWN | 1,059 | 0,060 |

Dengan demikian dari variabel-variabel tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Untuk nilai DW adalah 2,079 sehingga nilai d_u (1,74) < d

$(2,079) < 4-d$ » $(2,26)$. Berarti model yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Selanjutnya untuk hasil pengujian dari variabel-variabel independen tersebut diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 11 di bawah ini

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi dari Variabel-variabel Independen

| Variabel Independen | Koefisien regresi | Sig t |
|---------------------|-------------------|-------|
| (constant) | 0,06692 | 0,000 |
| SIZE | $5,181^{15}$ | 0,077 |
| DEBT | -0,0259 | 0,000 |
| OWN | -0,0681 | 0,140 |

Berdasarkan hasil pengujian di atas terlihat bahwa hasil yang diperoleh untuk variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $5,181^{15}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,077. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accruals*. Hal ini mengindikasikan bahwa praktek manajemen laba dapat didukung oleh variabel ukuran perusahaan publik. Temuan ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Kiswara (1999) yang menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan publik tidak cukup mewakili keberadaan unsur manajemen laba, tetapi temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Watts dan Zimmerman (1978) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manipulasi atas labanya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Guenther (1994) dia menemukan bahwa perusahaan besar

cenderung akan menurunkan labanya untuk mendapatkan penghematan pajak yang ditandai dengan akrual yang negatif arahnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan arah yang positif, berarti tidak konsisten dengan penelitiannya Guenther (1994). Dengan demikian maka hipotesis kedua yang diajukan tidak berhasil diterima. Hal ini menurut peneliti mungkin disebabkan karena untuk kondisi perusahaan-perusahaan di BEJ tidak hanya perusahaan kecil saja yang cenderung untuk menaikkan labanya tetapi mungkin juga perusahaan besar lebih cenderung untuk menaikkan labanya daripada menurunkan labanya. Laba merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan sebab merupakan cerminan dari kinerja suatu perusahaan. Apabila laba suatu perusahaan terlihat tinggi maka akan menarik minat para investor untuk melakukan investasi atau pengaruh lainnya misalnya harga sahamnya menjadi naik. Pertimbangan perusahaan untuk lebih cenderung menaikkan labanya mungkin dikarenakan nilai lebih yang akan diperolehnya lebih besar daripada penghematan pajak apabila dia menurunkan labanya.

Kemudian hasil yang diperoleh untuk variabel tingkat hutang perusahaan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,0259 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,1. Hal ini berarti bahwa tingkat hutang perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accruals*. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik manajemen laba dapat dipengaruhi oleh variabel tingkat hutang perusahaan. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh DeFond dan Jiambalvo (1994) dan Sweeney (1994) yang menyatakan

bahwa tingkat hutang juga akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manipulasi atas labanya, di mana perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan cenderung untuk menaikkan labanya karena selain untuk meminimalkan kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran perjanjian kredit, menurut peneliti juga dikarenakan untuk memberikan tampilan kinerja perusahaan yang baik di mata kreditor dan investor, sehingga meskipun tingkat hutangnya tinggi tapi laba perusahaan tetap tinggi. Guenther (1994) menyatakan bahwa perusahaan yang cenderung untuk menurunkan labanya untuk memperoleh penghematan pajak adalah perusahaan dengan tingkat hutang yang rendah, sedangkan perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi enggan untuk menurunkan labanya karena dengan tingkat hutang yang tinggi ini sebenarnya perusahaan telah memperoleh pengurangan laba yaitu dari beban bunga yang besar. Hal ini ditandai dengan akrual yang positif arahnya. Hasil dari penelitian ini negatif arahnya, berarti tidak konsisten dengan penelitiannya Guenther (1994). Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang diajukan tidak berhasil diterima. Hal ini menurut peneliti mungkin disebabkan karena perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi dia harus membayar beban bunga yang besar pula, disamping itu masih ada pengeluaran lain yang harus dibayarnya pula yaitu pajak atas labanya, sehingga dia lebih cenderung menurunkan labanya agar dapat mengurangi pengeluarannya yang sudah besar akibat beban bunga tersebut.

Berikutnya hasil yang diperoleh untuk variabel tingkat kepemilikan manajemen

menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,0681 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,140 yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi 10%. Dengan demikian maka hipotesis keempat yang diajukan tidak berhasil diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat kepemilikan manajemen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *discretionary accruals*. Hal ini mengindikasikan bahwa praktek manajemen laba tidak dapat didukung oleh variabel tingkat kepemilikan manajemen. Hal ini menurut peneliti mungkin disebabkan karena untuk kondisi perusahaan-perusahaan di BEJ tidak banyak perusahaan yang manajemen sekaligus sebagai pemegang saham (*insider ownership*), dengan rendahnya *insider ownership* ini maka kecenderungan manajemen untuk melakukan manajemen laba rendah. Temuan ini konsisten dengan penelitiannya Guenther (1994) yang juga menemukan bahwa tingkat kepemilikan manajemen tidak mempunyai pengaruh tetapi tidak sesuai dengan Hunt (1985) dan Niehaus (1989) yang menyatakan bahwa tingkat kepemilikan manajemen dapat memotivasi terjadinya praktek manajemen laba.

BAB V

Kesimpulan

5.1. Kesimpulan

Seringkali dalam pelaporan suatu laporan keuangan pihak manajemen perusahaan cenderung untuk merekayasanya demi kepentingan pribadinya. Kondisi tidak adanya informasi yang cukup, disadari oleh manajer sehingga akan mendorong perilaku yang tidak semestinya yaitu dengan melakukan praktik manajemen laba.

Penelitian ini menitikberatkan pada akrual sebagai indikasi adanya unsur manajemen laba. Pihak manajemen dalam merekayasa pengungkapan labanya tergantung daripada tujuan yang ingin dicapai. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *discretionary accrual* periode setelah adanya perubahan lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Hal ini berarti bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang ini praktik manajemen laba masih tetap dilakukan. Penelitian ini juga menemukan bahwa tindakan manajemen laba dapat dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan dan tingkat hutang perusahaan, sedangkan untuk faktor tingkat kepemilikan manajemen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba.

5.2. Diskusi

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan ditemukan bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru ternyata praktik manajemen laba masih tetap terjadi. Hal ini berarti bahwa pihak manajemen perusahaan cenderung untuk mentransfer labanya pada periode setelah perubahan Undang-Undang karena pada periode ini tarif pajak penghasilannya telah menurun sehingga perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

Kemudian ditemukan pula ternyata faktor ukuran perusahaan dan tingkat hutang perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba, tetapi arah yang diperoleh dari penelitian ini berlawanan. Untuk variabel ukuran perusahaan arah yang diperoleh positif berarti perusahaan besar cenderung untuk menaikkan labanya. Hal ini mungkin disebabkan karena nilai lebih yang akan diperolehnya melebihi daripada penghematan pajak yang dilakukannya. Untuk faktor tingkat hutang perusahaan arah yang diperoleh adalah negatif berarti semakin tinggi tingkat hutang perusahaan semakin cenderung untuk menurunkan laba. Hal ini mungkin disebabkan karena dengan tingkat hutang yang tinggi, beban bunga yang dibayar semakin besar pula. Oleh karena itu perusahaan cenderung untuk menurunkan labanya untuk memperkecil pengeluaran yang harus dilakukannya yaitu pembayaran pajak selain beban bunga tersebut. Walaupun sebenarnya beban bunga akan memberikan pengurangan terhadap laba perusahaan.

Berikutnya, untuk faktor tingkat kepemilikan manajemen, ditemukan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba. Hal ini mungkin disebabkan karena untuk kondisi perusahaan-perusahaan di BEJ tidak banyak perusahaan yang manajemen sekaligus sebagai pemegang saham (*insider ownership*), dengan rendahnya *insider ownership* ini maka tidak memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

5.3. Keterbatasan

Menurut peneliti, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian yang dapat diungkapkan di sini antara lain :

Pertama, penelitian ini hanya terbatas pada industri manufaktur saja, karena untuk menghindari adanya keragaman dari berbagai sektor industri yang ada di BEJ yang tentunya mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda, sehingga sampel yang diperoleh menjadi sedikit.

Kedua, faktor yang diteliti hanya ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan dan tingkat kepemilikan manajemen pada industri manufaktur saja sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisir pada jenis industri lainnya.

5.4. Riset Mendatang

Kemungkinan pengembangan untuk penelitian lebih lanjut yaitu dapat

mengembangkan penelitian dengan cara memperluas sampel penelitian tidak hanya pada industri manufaktur saja tetapi juga pada industri lainnya seperti jasa dan retail atau dapat juga dikelompokkan berdasarkan klasifikasi industri. Kemudian dapat juga dilihat dari faktor deviden karena deviden ini berhubungan erat dengan laba, sehingga diharapkan dari berbagai alternatif yang disarankan dapat meningkatkan penggeneralisasian hasil yang diperoleh.

5.5. Implikasi Penelitian

Meskipun pemerintah telah merubah tarif pajak penghasilan yang menghasilkan tarif yang menurun, ternyata praktik manajemen laba masih tetap dilakukan. Pada dasarnya manajemen laba sulit untuk dihilangkan, sehingga dengan adanya tarif yang menurun ini tidak menjamin perusahaan tidak akan melakukannya kembali. Oleh karena itu implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah untuk dapat lebih berhati-hati terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan mengingat berhubungan dengan sejumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Bagi investor penelitian ini bisa menunjukkan bahwa dalam menginterpretasikan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan harus berhati-hati mengingat adanya indikasi yang mengarahkan pada tindakan manajemen laba. Memang tidak semua perilaku manajemen laba akan menyebabkan kerugian yang material, akan tetapi secara etis hal tersebut merugikan pihak lain dan selama ini para praktisi bisnis

menganggap tindakan yang dilakukannya bukan merupakan hal yang melanggar aturan. Selain itu manajemen laba memang sulit untuk dihapuskan, hanya dibutuhkan kewaspadaan untuk mencegah adanya perilaku tersebut. Oleh karena itu kepada para akademisi diharapkan dapat mensosialisasikannya kepada pihak umum mengenai pengindikasian daripada manajemen laba ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beattie, Vivien et.al., 1994, "Extraordinary Items and Income Smoothing : A Positive Accounting Approach", *Journal of Business and Accounting*, 21 (6), September, 791-811.
- Cahan, S. F., 1992, "The Effects of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals : A Refined Test of Political-Cost hypothesis", *The Accounting Review*, 67 (1):77-95.
- Dechow, P.M., Sloan, R.G., dan Sweeney, A.P., 1995, "Detecting Earnings Management", *The Accounting Review*, 70(2), 193-225.
- DeFond, M.L., dan Jiambalvo, J., 1994, "Debt Covenant violation and manipulation of accruals", *Journal of Accounting and Economics*, 17, 145-176.
- Fischer, Marily, dan Rosenzweig, Kenneth, 1995, "Attitude of Students and Accounting Practitioners Concerning The Ethical Acceptability of Earnings Management", *Journal of Business Ethics*, 14:433-444.
- Frankel, Micah, dan Trezervant, Robert, 1994, "The Year End LIFO Inventory Purchasing Decision : An Empirical Test", *Accounting Review*, April, 382-398.
- Guenther, David A., 1994, "Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes : Evidence from the 1986 Tax Reform Act", *The Accounting Review*, Vol. 69, No.1, January, hal 230 - 243.
- Gujarati, Damodar, 1997, "Ekonometrika Dasar", Erlangga.
- Hunt, Herbert G., 1985, "Potential Determinants of Corporate Inventory Accounting Decisions", *Journal of Accounting Research*, Vol.23, No.2, Autumn, 448-467.
- Ilmainir, 1993, "Perataan Laba dan Faktor-Faktor Pendorongnya Pada Perusahaan Publik di Indonesia", Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Jin, Liauw She, 1997, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta", Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jones, J., 1991, "Earnings Management During Import Relief Investigations", *Journal of Accounting Research* 29, Autumn, hal 193 - 228.
- Kiswara, Endang, 1999, "Indikasi Keberadaan Unsur Manajemen Laba Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Publik", Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 1996, "Perpajakan", edisi ke-3, Andi Offset, Yogyakarta, hal 8.
- Maydew, E.L., 1997, "Tax induced earnings management by firms with net operating losses", *Journal of Accounting Research*, 35, 83-96.
- Naim, Ainun, dan Hartono, Jogiyanto, 1996, "The Effect of Antitrust Investigation on The Management of Earnings : A Further Empirical Test of Political Cost Hypothesis", *Kelola* 13/v, 126-141.
- Niehaus, Gregory R., 1989, "Ownership Structure and Inventory Method Choice", *The Accounting Review*, Vol.LXIV, No.2, April, 269-283.
- Scholes, M.S., Wilson, G.P., Wolfson, M.A., 1992, "Firms responses to anticipates reductions in tax rates : The Tax Reform Act of 1986", *Journal of Accounting Research*, 30, 161-185.
- Setiawati, Lilis, 1999, "Penilaian Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia dan Manajemen Laba dalam Perbankan", Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sugiri, Slamet, 1999, "Earnings Management : Teori, Model dan Bukti Empiris", *Telaah Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.3, No.1, April.
- Sutanto, Intan Imam, 2000, "Indikasi Manajemen Laba Menjelang IPO oleh Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta", Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sweeney, A.P., 1994, "Debt-Covenant Violation and Managers' Accounting Responses", *Journal of Accounting and Economics*, May :281-308.

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991.

Watts, R.L., dan J. L. Zimmerman, 1978, "Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standards", *The Accounting Review*, Vol.LIII, No.1, January, 112-132.

_____, 1986, "Positive Accounting Theory", Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall.

_____, 1990, "Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective", *The Accounting Review*, 65(1):131-156.

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN

| NO. URUT | NAMA PERUSAHAAN | KODE |
|-------------|------------------------------------|-------|
| 1 | PT. DELTA DJAKARTA | DLTA |
| 2 | PT. MULTI BINTANG INDONESIA | MLBI |
| 3 | PT. ULTRA JAYA MILK INDUSTRY | ULTJ |
| 4 | PT. ERATEX DJAJA LIMITED | ERTX |
| 5 | PT. HADTEX INDOSYNTETIC | HDTX |
| 6 | PT. RODA VIVATEX | RDTX |
| 7 | PT. GREAT RIVER INTERNATIONAL | GRIV |
| 8 | PT. MAYATEXDIAN INDUSTRY | MYTX |
| 9 | PT. MAYERTEX INDONESIA | MYRX |
| 10 | PT. SEPATU BATA | BATA |
| 11 | PT. EKADHARMA TAPE INDUSTRIES | EKAD |
| 12 | PT. INTAN WIJAYA CHEMICAL INDUSTRY | INCI |
| 13 | PT. TRIAS SENTOSA | TRST |
| 14 | PT. GADJAH TUNGGAL | GJTL |
| 15 | PT. GOODYEAR INDONESIA | GDYR |
| 16 | PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | INTP |
| 17 | PT. SEMEN CIBINONG | SMCB |
| 18 | PT. CITRA TUBINDO | CTBN |
| 19 | PT. JAYA PARI STEEL | JPRS |
| 20 | PT. LIONMESH PRIMA | LMSH |
| 21 | PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN | TBMS |
| 22 | PT. VOKSEL ELECTRIC | VOKS |
| 23 | PT. ASTRA GRAPHIA | ASGR |
| 24 | PT. ASTRA INTERNATIONAL | ASII |
| 25 | PT. INDOSPRING | INDS |
| 26 | PT. LIPPO INDUSTRIES | LPIN |
| 27 | PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL | PRAS |
| 28 | PT. UNITED TRACTORS | UNTR |
| 29 | PT. BAYER INDONESIA | BYSP |
| 30 | PT. MERCK INDONESIA | MERCK |
| 31 | PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA | SCPI |
| 32 | PT. SQUIBB INDONESIA | SQBI |
| 33 | PT. UNILEVER INDONESIA | UNVR |
| 34 | PT. SURYA TOTO INDONESIA | TOTO |